

PENTINGNYA REVITALISASI PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENCEGAH MEKARNYA RADIKALISME PADA GENERASI MUDA¹

Oleh :
Franky Rengkung² & Johny P. Lengkong³

ABSTRAK

Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela untuk menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata, untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkuat dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi dunia, modernisasi dan pesatnya era teknologi informatika, Konsensus nasional mulai luntur bahkan cenderung terkikis habis, padahal selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, namun dalam kenyataannya konsensus nasional ini makin termarginal dihadap oleh ideologi dan idealisme yang multi kultur dan muti dimensi akibatnya makin memudar nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan keragaman yang mulanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia semakin hari terus terkoyak dan sejujurnya dapat dikatakan mengalami suatu kemunduran yang sangat menyedihkan. Indikasi dari kemunduran tersebut terlihat dengan semakin menipisnya semangat kebangsaan, kesadaran memiliki negeri ini dan makin kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila pada hampir semua generasi bangsa ini.

Kata Kunci : Pancasila; Radikalisme; Generasi Muda

ABSTRACT

The importance of the position of Pancasila for the Indonesian people in the life of society, nation and state, so that the basic ideas that contain the concepts, principles and values contained in Pancasila must contain the truth of values that are not foreign to Indonesian society. Thus the people are willing to accept, believe and apply in real life, so that the basic ideas are strong and strong in order to be able to anticipate the times. To maintain, maintain, strengthen and socialize Pancasila, state administrators and all citizens are required to understand, believe in and implement the truth of the values of Pancasila in the life of the community, nation and state. However, as time goes by and the development of world globalization, modernization and the rapid development of the era of information technology, the national consensus is starting to fade and even tends to be completely eroded, even though so far its basic values have become the basis for planting, growing, developing a sense, spirit and national spirit and providing guidance, guidance and guidance for the Indonesian nation in carrying out the struggle to achieve its national ideals, but in reality this national consensus is increasingly being blocked by multi-cultural and multi-dimensional ideologies and ideals as a result of the fading of the values of nationality, diversity and diversity which initially became pride. the Indonesian nation continues to be torn apart every day and honestly it can be said that it is experiencing a very sad setback. Indications of this decline can

¹ Disampaikan pada sosialisasi Kegiatan PKM Universitas Sam Ratulangi di SMA 08 Manado

² Staf Pengajar FISIP UNSRAT

³ Staf Pengajar FISIP UNSRAT

be seen in the depletion of the national spirit, the awareness of belonging to this country and the less and less understanding of the life order based on the values of the Pancasila ideology in almost all generations of this nation.

Keywords: Pancasila; Radicalism; Young generation

PENDAHULUAN

Pancasila secara sistematis disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan *philosofische grondslag*, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Takdir kemajemukan bangsa Indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang lain mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemajemukan dalam kesamaan rasa dan pengalaman sebagai anak jajahan ini menemukan titik temunya dalam Pancasila, menggantikan beragam keinginan subyektif beberapa kelompok bangsa Indonesia yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama maupun ideologi dan semangat kedaerahan tertentu. Keinginan-keinginan kelompok tersebut mendapatkan titik temunya pada Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai kesepakatan bersama sebagai titik pertemuan beragam komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara-bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau *Leitstar*, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan ber-agama.

Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela untuk menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata, untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi dunia, modernisasi dan pesatnya era teknologi informatika, Konsensus nasional mulai luntur bahkan cenderung terkikis habis, padahal selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, namun dalam kenyataannya konsensus nasional ini makin termarginal dihadap oleh ideologi dan idealisme yang multi kultur dan muti dimensi akibatnya makin memudar nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan keragaman yang mulanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia semakin hari terus terkoyak dan sejujurnya dapat dikatakan mengalami suatu kemunduran yang sangat menyedihkan. Indikasi dari kemunduran tersebut terlihat dengan semakin menipisnya semangat kebangsaan, kesadaran memiliki negeri ini dan makin kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila pada hampir semua generasi bangsa ini.

Gerakan separatis, teroris dan pemberontak yang sering mengatasnamakan agama dan suku makin menjamur dan tumbuh pesat, terus menerus menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian antar rakyat telah menimbulkan perpecahan yang makin kentara, terlebih sifat egosentris yang mementingkan diri sendiri melahirkan masyarakat yang tak punya toleransi, kasih sayang dan menghargai hak-hak orang lain. Belum lagi hancurnya moral anak bangsa dengan tauran, narkoba dan kehidupan bebas sampai pada kepongahan dan kerakusan yang berlebel koruptor seakan bukan lagi hal yang tabu di negeri ini. Membuat komponen bangsa ini makin terpuruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itulah kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai kebangsaan khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, demi meneguhkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan yang menjadi konsensus nasional, sehingga diharapkan bangsa Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan dan mampu menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah terpaan arus globalisasi dan modernisasi yang bersifat multidimensial.

TINJAUAN PUSTAKA

• Pendidikan Pancasila

Menurut Kenichi Ohmae, 1995 yaitu, punahnya suatu negara dapat terjadi karena empat "I", yaitu industri, investasi, individu, dan informasi (Ohmae, 2002). Untuk itu pentingnya pendidikan Pancasila diselenggarakan di seluruh tingkatan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas generasi muda dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain:

1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri,
2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang,
3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional,
4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan,
5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa,
6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum,
7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.

Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa.

Keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi generasi muda. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam hal ini, Riyanto (2009: 4) menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting, tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha/*entrepreneur*, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.

• Radikalisme

1. Pengertian Radikalisme

Kata "radikal" berasal dari bahasa Latin, "radix" yang artinya "akar". Menurut Hornby (2000:691) kata radikal didefinisikan sebagai sikap atau paham yang ekstrim, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Radikalisme tidak harus muncul dalam wujud yang berbau

kekerasan fisik. Ideologi pemikiran, kampanye yang masif dan demonstrasi sikap yang berlawanan dan ingin mengubah mainstream dapat digolongkan sebagai sikap radikal.

Selanjutnya, menurut Nuhriison (2009:36) radicalism artinya doktrin atau praktek penganut paham radikal atau ekstrims. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.

Sartono (1985: 38) mengemukakan bahwa radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan berkuasa.

Sedangkan dalam ilmu sosial, menurut Hasani (2010:19) radikalisme diartikan sebagai pandangan yang melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.

Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan. Radikalisme keagamaan semakin meningkat di Indonesia ini ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi teror tersebut telah menyedot banyak potensi dan energi kemanusiaan serta telah merenggut hak hidup orang banyak termasuk orang yang sama sekali tidak mengerti permasalahan ini. Salah satu bentuk radikalisme yang mengatasnamakan agama adalah adanya organisasi garis keras seperti Al Qaeda, dan ISIS.

Adanya berbagai perbedaan dalam pemahaman ilmu agama dan keberadaan pemuda sebagai energi terkuat dalam mempertahankan kesatuan bangsa diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis dan sikap saling menasehati dalam kebaikan serta masyarakat mampu saling menghargai dan meningkatnya rasa toleransi antar umat beragama. Pemuda juga diharapkan mampu mencegah arus dari berbagai paham yang akan merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Namun realita yang terjadi di masyarakat berbagai perpecahan dan konflik atas nama agama seringkali terjadi. Padahal agama apapun melarang adanya perpecahan antar umatnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

2. Faktor Penyebab Munculnya Paham Radikalisme.

Menurut Adjie Suradji dalam Kompas, Kamis 28 September 2017 ketika dunia maya menjadi media pencarian jati diri, karakter, dan identitas saat itulah kelompok radikal memanfaatkan peluang untuk memaparkan ideologi atau pemahamannya. Banyaknya anak muda yang teradikalisasi, menjadi teroris adalah potret keberhasilan perekrutan lewat propaganda yang memanfaatkan media sosial. Adjie Suraji lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaku peledakan 10 bom pada empat kereta api di tiga stasiun Madrid, Spanyol, 11 Maret 2004 yang menewaskan 191 orang dan mencederai 2.000 lainnya, semua berstatus mahasiswa, belajar merangkai bom lewat internet. Kemudian, 2006 Mohammad Atif Suddique (21) dari Clackmannanshire, Glasgow, Inggris, ditangkap di Punjab, Pakistan, ketika hendak bertemu Aabid Hussain Khan (anggota sel teroris 18 Toronto), berkaitan rencana jadi martir bom jihad bunuh diri. Generasi milenial yang teradikalisasi di Indonesia juga tidak sedikit. Ivan Armadi Hasugian (18) pelaku penyanderaan dan rencana peledakan bom di Gereja Santo Joseph, Medan. Sultan Azinsyah (22), pelaku aksi penyerangan polisi di Tangerang pada tanggal 20 Oktober 20016; Juhanda (33), pelaku peledakan bom di Gereja Oikumene, Samarinda. Mereka ini adalah sekelompok anak muda yang terlibat gerakan radikal yang masih bersifat konvensional.

Berbagai peristiwa terorisme juga dapat terlihat dengan jelas bahwa para pelaku umumnya masih berusia muda atau bahkan kalangan remaja. Peristiwa tersebut dapat dilihat mulai dari bom Bali, bom Thamrin, bom Kampung Melayu, hingga bom Panci Bandung. Karena itu, masalah radikalisme menjadi suatu ancaman nyata bagi generasi muda di Indonesia.

Pemerintah dan pihak-pihak terkait, kini lebih gencar mencegah radikalisme atau deradikalisasi, khususnya di kalangan remaja atau pemuda. Direktur Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan, usia muda termasuk masa rentan menjadi intoleran dan radikal. Karena mereka masuk dalam fase mencari jati diri atau identitas. Apalagi, generasi ini melihat adanya ketidakadilan di sekitar mereka. Akibatnya, mereka dengan mudah menerima gagasan-gagasan dan pemikiran radikal yang mereka peroleh dengan mudah, melalui tulisan di dunia maya maupun lisan yang disampaikan pemuka agama. Ada semacam pemahaman yang keliru tentang jihad. Orang yang punya konsep pemahaman Islam yang literalis seperti mencuri potong tangan, berzinah dirajam dalam konteks modern seperti saat ini lebih mudah teradikalisasi. Radikalisme terjadi karena beberapa faktor dan bukanlah sebuah paham yang muncul begitu saja.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya revitalisasi pemahaman nilai-nilai kebangsaan guna mencegah mekarnya radikalisme dan demi utuhnya NKRI.

Selain melakukan sosialisasi perlu juga akan membentuk tim sosialisasi agar kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan ini dapat terus dilanjutkan.

PEMBAHASAN

Menurut penjelasan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi:

1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai dasar negara
4. Pancasila sebagai ideologi negara
5. Pancasila sebagai sistem filsafat
6. Pancasila sebagai sistem etika
7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*student centered learning*), untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideology bangsa secara *scientific*. Dengan harapan, nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi *guiding principles* atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan/program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 menegaskan bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Harapan tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi, pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat

preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah menggunakan atau mengalokasikan 20% dana APBN yang sebagian berasal dari pajak untuk membiayai pendidikan nasional.

Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Lebih-lebih, para mahasiswa yang *notabene* merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depan.

Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan/program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan/program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang.

A. UPAYA DAN SOLUSI DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI INDONESIA

Untuk mencegah penyebaran paham radikal, antara lain dengan semangat menjalankan nilai-nilai Pancasila yang terbukti sudah menjadi alat pemersatu bangsa. Dengan semangat Pancasila para pemuda dan segenap komponen bangsa harus merapatkan barisan untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme demi keutuhan NKRI dan kedamaian di dunia. Lebih lanjut, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) mengenalkan pendidikan Pancasila gaya baru.

Pemahaman Pancasila menjadi jawaban untuk mencegah radikalisme menyusup ke generasi muda. Tidak hanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, jika sila ke-2 dan ke-5 diamalkan dan diwujudkan, ide mengenai negara khilafah atau ide-ide radikal lainnya tidak akan diterima masyarakat Indonesia. Namun demikian, selagi masih banyaknya korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat negara, sedang disisi lain masyarakat miskin masih banyak, ini mudah sekali jadi ladang subur persemaian gagasan radikalisme.

Mencegah upaya propaganda paham radikal juga dapat melalui media. Peran media menjadi hal yang penting sebagai respon dalam menghadapi ancaman asimetris, mempunyai peranan sangat strategis dan efektif yang dapat mempengaruhi, baik situasi nasional, regional maupun internasional diberbagai bidang. Kekuatan media dapat dijadikan alat untuk merubah persepsi, opini dan kontrol sosial yang mengarah kepada kebijakan publik. Persepsi dan nilai-nilai yang disampaikan oleh media massa sering kali dianggap sebagai persepsi masyarakat secara keseluruhan. Semakin sering berita tersebut muncul, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan. Melalui berita-berita yang disiarkan, secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk dalam hal pemberantasan radikalisme dan terorisme. Upaya untuk mencegah paham radikal tidak akan berdampak signifikan tanpa bantuan media, baik cetak, elektronik maupun online, karena tanpa kehadiran media, himbuan, fatwa, peringatan dan pemikiran pemangku kepentingan tidak akan ter ekspose ke publik.

Media massa merupakan elemen integral dan penting dari masyarakat lokal, nasional, regional, maupun global untuk menyediakan berbagai kebutuhan informasi bagi masyarakat. Karenanya dalam mengatasi akar terorisme yang bermotif ideologis, doktrinal, serta penyebarannya yang bervariasi, sinergitas lembaga aparat keamanan dibantu dengan peran berbagai pihak, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh politik, tokoh agama, dan kontribusi dari media sangat diperlukan agar paham radikalisme dan terorisme di masyarakat tidak berkembang menjadi kekuatan yang dapat memecah NKRI.

B. PERAN GENERASI MUDA DALAM MENCEGAH MEKARNYA RADIKALISME

Pemuda sering dijadikan target utama oleh para kelompok radikal dalam penyebaran paham radikal karena pemuda selama ini mudah sekali untuk dihasut. Namun sebenarnya, para

pemuda tidak hanya mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah ini namun juga potensi untuk memberantas masalah-masalah radikalisme di Indonesia.

Para pemuda dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: Pemuda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman dan kondusif di tengah perbedaan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa ini membutuhkan peran pemuda sebagai pemersatu keberagaman yang hadir di Indonesia. Pemuda dapat melakukan kerja sama dengan tenaga pendidik formal dalam memberikan informasi mengenai nilai-nilai agama yang benar. Tidak hanya memberikan informasi para pemuda juga harus berperan dalam penanaman nilai agama yang benar dalam jiwa para anak bangsa.

Selain itu arus informasi gerakan radikalisme di dunia yang begitu mudah sampai kepada anak bangsa juga menjadi prioritas perhatian pemuda Indonesia. Pemuda hendaknya menjadi penyaring paham-paham negatif yang menyentuh anak bangsa. Pemuda harus berperan memberikan penyuluhan ataupun sosialisai berkenaan dengan radikalisme kepada masyarakat. Informasi akan mudah sampai di masyarakat ketika para pemuda turun langsung ke lapangan berbaur dengan masyarakat dalam penyampaian bahaya paham tersebut. Dengan penyuluhan tersebut masyarakat tidak lagi kebingungan akan hadirnya paham tersebut di sekitarnya, sehingga masyarakat mampu menghindari paham tersebut.

Paradigma masyarakat yang masih menganggap sebuah perbedaan adalah kekacauan juga harus dihilangkan dalam memori ingatan masyarakat. Pemuda harus mampu berperan dalam proses perubahan paradigma tersebut dengan mengadakan berbagai kegiatan yang mampu mempererat tali silaturahmi antar kelompok masyarakat. Kesenjangan sosial antara kelompok yang satu dengan yang lainnya akan mudah hilang ketika tali silaturahmi terikat erat diantara mereka.

Gerakan-gerakan radikalisme yang beredar di tengah masyarakat juga berperan besar dalam penyebaran paham tersebut. Oleh karenanya, para pemuda perlu diarahkan pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi pemuda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi pemuda dari pengaruh ideologi radikal. Pemuda dituntut untuk membentuk organisasi kemanusiaan atau organisasi yang mampu melibatkan masyarakat ke dalam kegiatan yang positif. Dengan dibentuknya organisasi kemanusiaan tersebut pemuda berperan sebagai penggerak masyarakat untuk tetap peduli terhadap orang lain yang terkena bencana atau musibah sehingga para pemuda mampu kembali mempererat tali silaturahmi antar kelompok masyarakat.

Peran-peran tersebut akan berjalan ketika dalam diri para pemuda telah tertanam sikap toleran dan keprihatinan terhadap maraknya kasus perpecahan ataupun pertikaian di masyarakat. Ketika sikap tersebut telah tertanam dalam diri pemuda maka dorongan untuk mempersatukan bangsa Indonesia akan terus digalakkan dan pemuda sebagai unsur terpenting di dalamnya.

PENUTUP

- Kesimpulan
 - Revitalisasi pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam pancasila sangat penting dilakukan untuk mencegah mekarnya paham radikalisme khususnya pada kalangan generai muda, dan demi keutuhan NKRI.
- Saran
 - Sebaiknya sosialisasi tentang pentingnya revitalisasi pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila demi keutuhan NKRI dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.

REFERENSI

- A.S Hornby. 2000. *Oxford Advanced, Dictionary of Current English*. UK: OUP.
- Bruggink, (1999), *Refleksi tentang Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Darsis Huma, (2007), *Cita-Cita Negara Hukum di Indonesia*, Penerbit eLKAF, Ternate.
- Fernando Manulang, (200), *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan Konsitutionalisme*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahfud MD, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajagrafindo.
- Sabine George, (1961), *A History of Political Theory*, Chicago San Fransisco, Toronto London.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos. (2010)., *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Nuhrison M.Nuh. (2009), *Faktor-faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia* (HARMONI Jurnal Multikultural dan Multireligius. Vol.VIII Juli-September)
- Sartono Kartodirdjo. (1985). *Ratu Adil*. Jakarta Sinar Harapan

Sumber Lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Perubahannya
- Materi Dasar, Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) TIM KONSTITUSI TAPLAI LEMHANNAS RI)
- Bahan Ceramah, Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Irjen Pol. Drs. Harwiyanto, M.M., M.HUM (Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum & HAM LEMHANNAS RI).
- Harian Kompas, Kamis 12 Oktober 2017